Rancangan Akhir

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
TAHUN 2025 - 2029



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan Diktum KETIGA huruf c Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah maksimal 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara *Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri *Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 142);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 *tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah* (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

14. *Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03* Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong yang disusun setiap tahun sekali.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD yang periodenya mengikuti periode Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode I (satu) tahun.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu periode dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025-2029 yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Program dan Kegiatan di dalam Renstra Perangkat Daerah disusun berpedoman pada RPJMD, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Renja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Rancangan Renstra Perangkat Daerah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan RPJMD.

Pasal 5

Dokumen Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I : pendahuluan;
b. bab II : gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis Perangkat Daerah;
c. bab III : tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
d. bab IV : program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
e. bab V : penutup.

Pasal 6

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dalam jangka waktu berlakunya Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 8

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

Pasal 9

Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Apabila dalam waktu periodesasi Renstra Perangkat Daerah ini ada kebijakan dari pemerintahan yang lebih tinggi dan/atau adanya *force mejure* yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian dengan subtansi Renstra Perangkat Daerah, dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah yang penetapannya dengan menggunakan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 NOMOR 31

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2029

DAFTAR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Rencana Strategis Sekretariat Daerah
2. Rencana Strategis Sekretariat DPRD
3. Rencana Strategis Inspektorat Daerah
4. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
7. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11. Rencana Strategis Dinas Kesehatan
12. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17. Rencana Strategis Dinas Sosial
18. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja
19. Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
20. Rencana Strategis Dinas Perhubungan
21. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup
22. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
24. Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan
25. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
26. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
27. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
28. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
29. Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim
30. Rencana Strategis Kecamatan Tanjung
31. Rencana Strategis Kecamatan Murung pudak
32. Rencana Strategis Kecamatan Tanta
33. Rencana Strategis Kecamatan Muara Harus
34. Rencana Strategis Kecamatan Banua Lawas
35. Rencana Strategis Kecamatan Kelua
36. Rencana Strategis Kecamatan Pugaan
37. Rencana Strategis Kecamatan Jaro
38. Rencana Strategis Kecamatan Muara Uya
39. Rencana Strategis Kecamatan Haruai
40. Rencana Strategis Kecamatan Upau
41. Rencana Strategis Kecamatan Bintang Ara

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Jaksa Agung Suprapto, Kel. Tanjung, Kec. Tanjung, Kode Pos 71513
Laman: www.inspektorat.tabalongkab.go.id Pos el: inspektorat@tabalongkab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 - 2029

Kami telah mereviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029 sesuai Pedoman Reviu. Substansi yang dimuat dalam Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029 menjadi tanggung jawab sepenuhnya manajemen DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Kabupaten Tabalong.

Reviu bertujuan untuk memberi keyakinan terbatas bahwa Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah telah disusun sesuai ketentuan, standar, rencana atau norma berdasarkan kaidah- kaidah yang ditetapkan sebagai upaya membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA.

Tanjung, 18 September 2025
Plt. Inspektur Daerah,

Diyanto, SE, MT, FRMP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711013 200501 1 005

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa,karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Tahun 2025–2029 ini dapat disusun dengan baik.

Dokumen ini disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Renstra ini menjadi acuan penting dalam mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong agar lebih terarah, efektif, dan efisien dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Dalam penyusunannya, dokumen ini telah memperhatikan keselarasan dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong, serta memperhatikan masukan dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) yang terkait.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Harapan kami, dokumen ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam pelaksanaan pembangunan bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata di Kabupaten Tabalong, serta mendorong terciptanya masyarakat yang sehat, aktif, kreatif, dan berdaya saing.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pedoman yang bermanfaat bagi seluruh jajaran Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ke depan.

Tanjung, 20 September 2025

Kepala Dinas
Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Tabalong,

H. ZULFAN NOOR,S.sos,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700809 199003 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1. Latar Belakang 1
2. Dasar Hukum 2
3. Maksud dan Tujuan 4
4. Sistematika Penulisan 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN TABALONG
1. Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 7
a. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata 7
b. Sumber Daya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata 12
c. Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata 17
d. Kelompok Sasaran 21
e. Mitra 22
2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata
a. Permasalahan Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata 24
b. Isu Strategis 25
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
1. Tujuan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029 29
2. Sasaran Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029 31
3. Strategi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata Tahun 2025 - 2029 38
4. Arah Kebijakan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata Tahun 2025 - 2029 51
BAB VI PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 53
a. Program Perangkat Daerah 54

b. Kegiatan Perangkat Daerah 57
c. Sub kegiatan Perangkat Daerah beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif 76
d. Sub kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah
e. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 95
f. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 98
BAB V PENUTUP
a. Kaidah pelaksanaan 100
b. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan urusan pemerintahan daerah. 100

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, peran perangkat daerah sangat penting dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Salah satunya adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong, yang memiliki peran strategis dalam pengembangan sumber daya manusia melalui sektor kepemudaan dan olahraga, serta peningkatan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor pariwisata.

Sektor kepemudaan, olahraga, dan pariwisata memiliki keterkaitan yang erat dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemberdayaan pemuda yang aktif dan produktif menjadi pondasi penting dalam menciptakan generasi penerus yang berdaya saing. Demikian pula, pengembangan olahraga tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk membina kesehatan jasmani dan mental, tetapi juga sebagai sarana prestasi dan penguatan karakter bangsa. Di sisi lain, sektor pariwisata memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, serta melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Kabupaten Tabalong memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut di ketiga sektor tersebut. Namun, untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan potensi tersebut secara terencana dan berkelanjutan, diperlukan sebuah dokumen perencanaan strategis yang komprehensif, terarah, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan daerah maupun nasional. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Tahun 2025–2029 menjadi kebutuhan yang mendesak dan mendasar.

Rancangan Awal Renstra ini disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong serta sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong dalam merumuskan dan melaksanakan program-program kerja yang efektif, efisien, serta berdampak langsung bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Tabalong.

2. Dasar Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Staregis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

9. Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenlaktur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023 - 2042;
20. Keputusan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69;

3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029 dimaksudkan untuk :

- Sebagai perencanaan pembangunan yang berisi tujuan, program kerja Kepala Daerah Kabupaten Tabalong, berdasarkan pelaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

- Pedoman penyusunan program dan pagu indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong 2025 - 2029

- Sebagai acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

- Sebagai jabaran rencana program kegiatan dan sub kegiatan serta penetapan target-target kinerja dan pendanaan indikatif sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal.

Adapun tujuan Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai arah dan acuan untuk :

- Menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja/Tapkin Tahunan dan Rencana Anggaran

- Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan

- Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran

- Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan

- Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata

4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat antara lain :

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN TABALONG

Pada bab ini memuat antara lain :

1. Gambaran Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata
   a. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata
   b. Sumber Daya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata
   c. Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata
   d. Kelompok Sasaran
   e. Mitra
2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata
   a. Permasalahan Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata
   b. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini memuat antara lain :

1. Tujuan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisataKabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029
2. Sasaran Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029
3. Strategi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata Tahun 2025 - 2029
4. Arah Kebijakan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata Tahun 2025 - 2029

BAB VI PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini memuat antara lain :

a Program Perangkat Daerah
b. Kegiatan Perangkat Daerah
c. Sub kegiatan Perangkat Daerah beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
d. Sub kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah
e. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
f. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat antara lain :

a. Kaidah pelaksanaan
b. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan ini menetapkan struktur organisasi perangkat daerah di Kabupaten Tabalong, termasuk Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Selanjutnya, untuk mengatur lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabalong menetapkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 40 Tahun 2016. Peraturan Bupati ini ditetapkan pada 5 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal yang sama. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 ini merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016.

Kemudian, untuk memperbarui dan menyesuaikan dengan perkembangan tugas dan fungsi, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2023 ditetapkan pada 28 Juli 2023. Peraturan ini mengatur tentang tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong.

Dengan demikian, pembentukan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 dan diperbarui dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023.

Dalam Melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata
3. Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata
4. Pelaksanaan administrasi bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
5. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata
6. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya

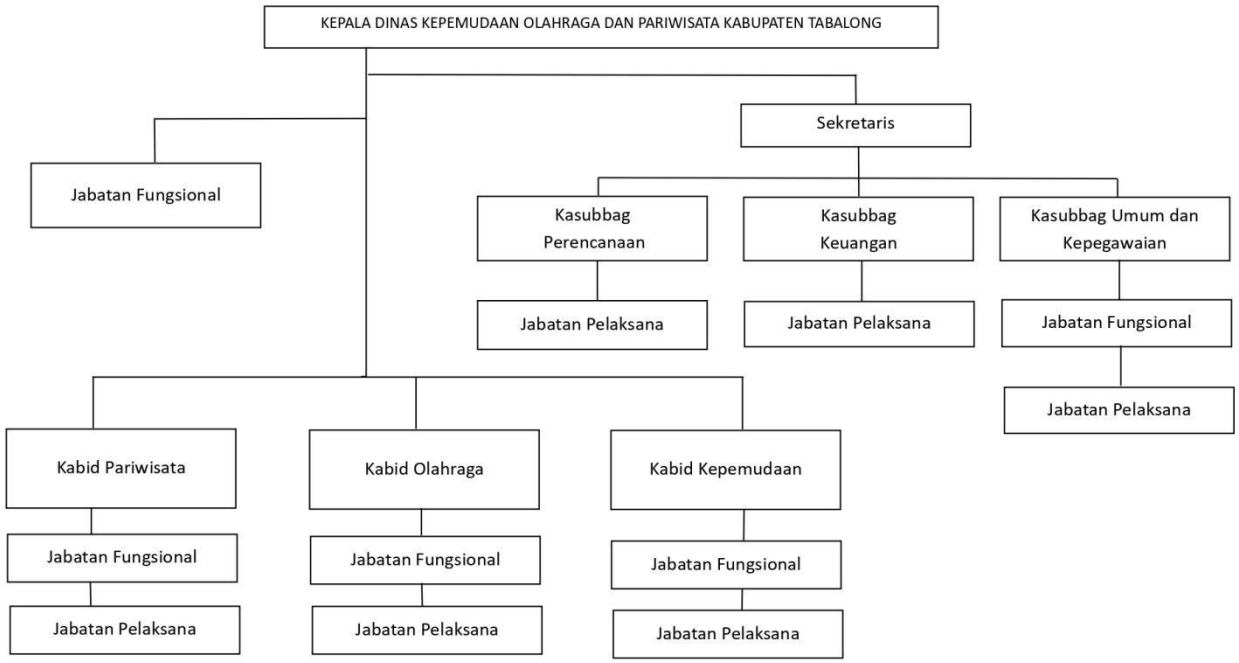
Unsur-unsur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata terdiri atas :

a. Sekretariat
b. Bidang Kepemudaan
c. Bidang Olahraga
d. Bidang Pariwisata
e. Jabatan Fungsional

Sekretariat terdiri dari atas :

a. Subbagian Perencanaan
b. Subbagian Keuangan
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN TABALONG



Tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

   Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih untuk melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta kebijakan teknis urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

2. Sekretaris

   Mengkoordinasikan, menyusun, membina, mengendalikan rencana kegiatan dan anggaran, rencana strategis, laporan evaluasi dan laporan kegiatan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pengelolaan surat menyurat dan rumah tangga, pengadministrasian kepegawaian, pengelolaan organisasi dan tata laksana, pengelolaan humas dan protokol Dinas Kepemudaan, 0lahraga dan Pariwisata.

   a. Subbagian Perencanaan

      Mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun, melaksanakan dan melaporkan urusan Perencanaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

   b. Subbagian Keuangan

      mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun, melaksanakan dan melaporkan urusan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

   c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

      mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun, melaksanakan urusan Umum dan Kepegawaian Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

3. Bidang Kepemudaan

   Bidang kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

dibidang kepemudaan. Dalam melaksanakan tugas, bidang kepemudaan menyelenggarakan fungsi;

a. Penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaa kebijakan dibidang kepemudaan.
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan.
c. Pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaa kebijakan di bidang kepemudaan

4. Bidang Olahraga

Bidang Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga. Dalam melaksanakan tugas, bidang olahraga menyelenggarakan fungsi :

a. Penusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga.
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga.
c. Pemantauan, analisisi, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga

5. Bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata. Dalam melaksanakan tugas, bidang pariwisata menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata.
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pariwisata
c. Pemantauan, analisis dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata.

6. Jabatan Fungsional

melaksanakan sebagian tugas Dinas Kepemudaan, 01ahraga dan Pariwisata sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, dan Pejabat Fungsional maupun P3K wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas maupun antara satuan organisasi di luar lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, memberikan pembinaan, pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sumber Daya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Keberadaan sumber daya manusia Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagai salah satu pendukung utama dibidang pelayanan publik dan pengembangan olahraga dan pariwisata dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh berbagai latar pendidikan yang berbeda, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Data Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				Jenis Kelamin		Jumlah
		IV	III	II	I	L	P	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1	-	1

2	Kesekretariatan	1	7	2	-	3	7	10
3	Bid. Kepemudaan	1	4	-	-	3	2	5
4	Bid. Olah Raga	4	-	-	-	4	-	4
5	Bid. Pariwisata	1	4	1	-	1	5	6
J u m l a h		8	15	3	-	12	14	26

Tabel 2.2
Data Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Pendidikan						Jenis Kelamin	
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	L	P
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	1	-
2	Kesekretariatan	1	6	2	1	-	-	3	7
3	Bid. Kepemudaan	1	4	-	-	-	-	3	2
4	Bid. Olah Raga	4	-	-	-	-	-	4	-
5	Bid. Pariwisata	1	2	2	1	-	-	1	5
6	UPT	-	-	-	-	-	-	-	
J u m l a h		8	12	4	2	-	-	12	14

Tabel 2.3
Data Jumlah Pejabat Struktural

No	Jabatan Struktural	Eselon	L	P	Jumlah
1	Kaepala Dinas	Eselon II b	1		1
2	Sekretaris	Eselon III a	1		1
3	Kepala Bidang	Eselon III b	2	1	3
4	Kepala Sub Bagian	Eselon IV a	1	2	3
	J u m l a h				9

Tabel 2.4
Data Jumlah Pejabat Fungsional

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Analis Kebijakan	2	1	3
2				
3				
	J u m l a h			

Tabel 2.5
Data Jumlah P3K

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Pranata Komputer Ahli Pertama		1	1
2	Penata Layanan Operasional		2	2
3	Pengadministrasi Umum	1		1
	J u m l a h	1	3	4

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong didukung dengan ketersediaan prasarana dan sarana.

Kelengkapan sarana dan prasarana kerja berupa aset tetap maupun aset lainnya merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya target kinerja kegiatan yang telah direncanakan. Adapun ketersediaan prasarana dan sarana yang disajikan dalam tabel inventarisasi berikut :

Tabel 2.6
Daftar Aset Berupa Gedung dan Bangunan

No.	Jenis Aset	Jumlah Unit Dalam Kondisi Baik
1	2	3
1	Gedung Olahraga Tertutup Permanen	14
2	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	2
3	Bangunan Olahraga Terbuka Permanen	22
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2
5	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	5
6	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1
7	Bangunan Tempat Kerja Lain - Lain	5
8	Bangunan Gedung Kantor Lain - Lain	1
9	Bangunan Tempat Pertemuan Lain - Lain	1
10	Bangunan Tempat Pendidikan Lain - Lain	1
11	Bangunan Tempat OR Lain - Lain	1
12	Bangunan Gedung Pertokoan Lain -	3

	Lain	
13	Bangunan Olahraga Terbuka Darurat	1
14	Bangunan Menara Telekomunikasi Lain - Lain	1
15	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1
16	Mes/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Semi Permanen	3
17	Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	2
18	Pagar Permanen	1
19	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	1

Sumber : Pengelola Barang Disporapar Kab. Tabalong

Tabel 2.8
Daftar Aset Berupa Tanah

NO	NAMA / JENIS BARANG	JUMLAH TAHUN 2023	BUKTI KEPEMILIKAN	
			Sertifikat	Bukti Lain
1	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga Lainnya (dst)	1		√
2	Tanah Persil Lainnya	1	√	
3	Tanah Persil Lainnya	1	√	
JUMLAH		3		

Tabel 2.9
Daftar Aset Berupa Peralatan dan Mesin

No.	NAMA/ JENIS BARANG	Jumlah Unit dalam Kondisi Baik
1	Pompa Air	3
2	Station Wagon	1
3	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2
5	Sepeda Motor	7
6	Alat angkutan apung bermotor untuk penumpang lainnya (dst)	2
7	Alat angkutan apung tak bermotor untuk barang lainnya (dst)	2
8	Gergaji Chain Saw	1
9	Mesin Bor Listrik Tangan	1
10	Stopwatch	4

11	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	6
12	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	6
13	Mesin Fotocopy Folio	1
14	Lemari Besi/Metal	1
15	Lemari Kaca	3
16	Rak Besi	5
17	Filing Cabinet Besi	20
18	Brandkas	1
19	Alat Penghancur Kertas	2
20	CCTV - Camera Control Television System	2
21	Papan Visual/Papan Nama	4
22	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1
23	Papan Nama Instansi	3
24	Papan Pengumuman	2
25	Alat Kantor Lainnya	4
26	Meja Kerja Kayu	14
27	Kursi Rapat	102
28	Kursi Putar	0
29	Kursi Biasa	11
30	Bangku Tunggu	70
31	Sofa	2
32	Meja Rapat	11
33	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1
34	Mesin Pemotong Rumput	14
35	Alat Pembersih lainnya	17
36	Lemari Es	5
37	A.C. Window	4
38	A.C. Split	11
39	Kipas Angin	13
40	Treng Air/Tandon Air	3
41	Kompor Gas (Alat Dapur)	2
42	Tabung Gas	1
43	Wireless	5
44	Microphone	1
45	Televisi	8
46	Camera Video	4
47	Tangga Aluminium	3
48	Dispenser	9
49	Handy Cam	2
50	Karpet	15
51	DVD Player	1
52	Loudspeaker	1
53	Alat Rumah Tangga Lain-lain	15
54	Sound System	1

55	Alat Pembantu Kebakaran	1
56	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	3
57	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2
58	Meja Kerja Pejabat Eselon III	9
59	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12
60	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2
61	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	8
62	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	14
63	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	10
64	Layar Film/Projector	4
65	Camera Electronic	1
66	Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	1
67	Facsimile	1
68	Pesawat Telephone	2
69	Handy Talky (HT)	26
70	P.C Unit	14
71	Lap Top	38
72	Note Book	2
73	Peralatan Personal Komputer lainnya	16
74	Printer (Peralatan Personal Komputer)	35
75	Router	8
76	Peralatan Jaringan lainnya	30
77	Modem	2
78	Peralatan Komputer lainnya	2
79	Tenda	1
80	Matras	10
81	Peralatan Olahraga lainnya (dst)	100
82	Unit pemeliharaan lapangan lainnya (dst)	2
83	Meja Resepsionis	4
84	Kursi Tamu	1
85	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1
J U M L A H		**793**

Sumber : Data Pengelola Barang Disporapar Kab. Tabalong s.d Desember 2024

c. Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong berdasarkan capaian kinerja sasaran strategis rencana strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong 2020 – 2024 sebagai indikator Kinerja Utama (IKU) disajikan sebagai berikut :

Capaian ndikator Kinerja Utama pada Rentra Tahun2020 - 2024

Sasaran dan Indikator Sasaran	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
Meningkatkan pembinaan kepemudaan Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	2020	86	86	100
	2021	88	88	100
	2022	91	91	100
	2023	96	96	100
	2024	100	98	98
Sasaran dan Indikator Sasaran	**Tahun**	**Target (%)**	**Realisasi (%)**	**Capaian Kinerja (%)**
Meningkatkan Kapasitas organisasi kepramukaan Persentase peningkatan kapasitas dan peran aktif kepramukaan	2020	-	-	-
	2021	88	88	100
	2022	93	93	100
	2023	96	94	100
	2024	100	100	100
Sasaran dan Indikator Sasaran	**Tahun**	**Target (Orang)**	**Realisasi (Orang)**	**Capaian Kinerja (%)**
Meningkatnya Pembinaan keolahragaan Jumlah Atlet berprestasi	2020	30	23	76,67
	2021	35	68	194,29
	2022	40	45	112,50
	2023	45	98	217,78
	2024	50	46	92
Sasaran dan Indikator Sasaran	**Tahun**	**Target (Orang)**	**Realisasi (Orang)**	**Capaian Kinerja (%)**
Meningkatnya Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata serta Sarana dan Prasarana Pariwisata Jumlah Kunjungan Wisata	2020	850.000	861.065	101,30
	2021	909.500	3.242.409	356,50
	2022	953.000	3.137.656	329,24
	2023	989.000	3.896.677	394,00
	2024	1.020.000	1.023.390	100,33
Sasaran dan Indikator Sasaran	**Tahun**	**Target (%)**	**Realisasi (%)**	**Capaian Kinerja (%)**
Meningkatnya promosi dan pemasaran pariwisata Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten	2020	-	-	-
	2021	1,5	1.80	120
	2022	2	1,30	65
	2023	3	1,37	45,67
	2024	4	1,42	35.5

Tabel 2.9
Capaian Kinerja Sasaran Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2020 s/d 2024

Sasaran	Indikator sasaran	Target					Realisasi					Capaian %				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya pembinaan kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	86%	88%	91%	96%	100%	86%	88%	91%	96%	98%		100%	100%	100%	98%
Meningkatkan Kapasitas organisasi kepramukaan	Persentasi peningkatan kapasitas dan peran aktif kepramukaan	-	88%	93%	96%	100%	-	88%	93%	96%	100%	-	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Pembinaan keolahragaan	Jumlah atlet berprestasi	30 orang	35 orang	40 orang	45 orang	50 orang	23 orang	68 orang	45 orang	98 orang	46 orang	76,67 %	194,29 %	112,50 %	217,78 %	92%
Meningkatnya Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata serta Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	850 orang	909.500 orang	953.000 orang	989.000 orang	1.020.000 orang	861.065 orang	3.242.409 orang	3.137.656 orang	3.896.677 orang	1.023.390 orang	101,30 %	356,50 %	329,24 %	394,00 %	100,33 %
Meningkatnya promosi dan pemasaran pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten	-	1,5%	2%	3%	4%	-	1,8%	1,3%	1,37%	1,42%	-	120%	65%	45,67%	35,5%
Meningkatkan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk indikator persentase organisasi pemuda yang aktif selama empat tahun pertama capaian indikator ini selalu tercapai sesuai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024 terjadi penurunan capaian menjadi 89%, sehingga target tahun terakhir tidak tercapai. Secara kumulatif, rata capaian periode 2020-2024 masih cukup tinggi (sekitar 97,8%, namun trend diakhir periode perlu mendapat perhatian.

Faktor penyebab tidak tercapainya target tahun 2024 diantaranya menurunnya minat pemuda untuk berogranisasi secara formal, beralihnya komunitas nonformal/ komunitas digital, kurangnya monitoring dan pendamping intensif terhadap organisasi di Kabupaten Tabalong. Faktor pendukung yang menyababkan tahun 2020-2023 sukses karena adanya pembinaan berkelanjutan.

d. Kelompok Sasaran

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Tabalong memiliki beberapa kelompok sasaran utama dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Berikut adalah kelompok sasaran yang menjadi fokus utama Disporapar:

1. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

   Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata memberikan perhatian khusus kepada Pokdarwis sebagai mitra dalam pengembangan sektor pariwisata dalam mewujudkan kebersihan dan keindahan di tempat wisata. Selain itu, Disporapar juga mengalokasikan anggaran untuk pelatihan dan pembinaan pemandu wisata serta ekonomi kreatif, termasuk pembangunan sarana dan prasarana di sejumlah tempat wisata .

2. Atlit Disabilitas

   Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata memberikan dukungan kepada atlet disabilitas melalui dana hibah untuk menunjang olahraga para atlet. Dana tersebut diserahkan melalui Komite Paralimpiade Nasional Indonesia (NPCI) Kabupaten Tabalong dan digunakan untuk pembinaan manajemen organisasi dan prestasi. Atlet paralympic Tabalong telah meraih prestasi di tingkat Kalimantan Selatan dan nasional, termasuk cabang olahraga judo, bulu tangkis, atletik, dan angkat berat .

   Adapun kriteria atlet disabilitas secara umum yang bisa digunakan dalam dunia olahraga, terutama pada ajang kompetisi olahraga disabilitas di tingkat nasional dan daerah :

   a. Memiliki status disabilitas yang diakui
      - Disabilitas fisik (amputasi, kelumpuhan, cerebral palsy, polio, dll).
      - Disabilitas sensorik (tunanetra, tunarungu).

- Disabilitas intelektual (hambatan perkembangan intelektual tertentu).

b. Teregistrasi secara resmi

- Terdaftar pada organisasi olahraga disabilitas, seperti NPC atau oganisasi olahraga disabilitas daerah/cabang olahraga.
- Memiliki dokumen pendukung seperti kartu identitas, surat keterangan disabilitas (jika dipersyaratkan), dan rekomendasi dari klub/ pelatih.

c. Klasifikasi fungsional (Functional Classification)

Atlet diklasifikasikan menurut tingkat dan jenis disabilitas agar kompetisi berlangsung adil.

d. Memenuhi persyaratan teknis cabang olahraga

3. Pemuda dan wirausaha

Disporapar memberikan pelatihan keterampilan kepada pemuda (usia 16-30 tahun) di Kabupaten Tabalong, seperti pelatihan sablon, untuk meningkatkan keterampilan dan membuka peluang wirausaha baru di kalangan pemuda. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan yang dapat membantu mereka dalam mengembangkan usaha sendiri .

4. Masyarakat umum dan pengunjung wisata

Disporapar juga melaksanakan kegiatan yang melibatkan masyarakat umum dan pengunjung wisata, seperti pasar murah selama bulan Ramadan. Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan dan membantu masyarakat dalam mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah. Pasar murah ini dilaksanakan di beberapa lokasi wisata dan melibatkan Pokdarwis sebagai pelaksana .

e. Mitra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Tabalong menjalin kemitraan dengan berbagai pihak

untuk mendukung pengembangan sektor kepemudaan, olahraga, dan pariwisata di daerah tersebut. Berikut adalah beberapa mitra utama Disporapar:

1. Kelompok sadar wisata (Pokdarwis)

   Disporapar bekerja sama dengan Pokdarwis dalam pengelolaan destinasi wisata lokal dalam mewujudkan kebersihan dan keindahan di tempat wisata. Selain itu, Disporapar juga mengalokasikan anggaran untuk pelatihan dan pembinaan pemandu wisata serta ekonomi kreatif, termasuk pembangunan sarana dan prasarana di sejumlah tempat wisata .

2. National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) Kabupaten Tabalong

   Disporapar memberikan dukungan kepada NPCI Kabupaten Tabalong melalui hibah dana untuk menunjang olahraga para atlet disabilitas. Dana tersebut digunakan untuk pembinaan manajemen organisasi dan prestasi. Atlet paralympic Tabalong telah meraih prestasi di tingkat Kalimantan Selatan dan nasional, termasuk cabang olahraga judo, bulu tangkis, atletik, dan angkat berat .

3. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tabalong

   Disporapar bekerja sama dengan KONI Kabupaten Tabalong dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan olahraga. Salah satu contoh kolaborasi adalah penyelenggaraan "Tabalong Cup" yang memperebutkan piala bergilir Bupati Tabalong, yang melibatkan berbagai cabang olahraga dan peserta dari tingkat kabupaten hingga provinsi Kalimantan Selatan .

4. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tabalong Jaya Persada

   Disporapar juga bermitra dengan Perumda Tabalong Jaya Persada dalam pelaksanaan kegiatan sosial ekonomi, seperti pasar murah selama bulan Ramadan. Kegiatan ini bertujuan

untuk memudahkan dan membantu masyarakat dalam mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah. Pasar murah ini dilaksanakan di beberapa lokasi wisata dan melibatkan Pokdarwis sebagai pelaksana .

5. Kelompok tani hutan

   Untuk objek wisata yang berada dalam zona hijau atau kawasan hutan, Disporapar bekerja sama dengan kelompok tani hutan melalui kesepakatan. Kolaborasi ini bertujuan untuk pengelolaan dan pemanfaatan potensi wisata alam secara berkelanjutan.

6. Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Tabalong adalah organisasi kepramukaan di tingkat kabupaten yang berfunsi sebagai wadah pembinan generasi muda melalui kegiatan kepramukaan. Kwarcab menjadi mitra Dinas Kepemudaan dalam membina karakter, kepemimpinan, dan ketrampilan generasi muda.

2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga didapati berbagai permasalahan sebagai berikut :

1. Rendahnya daya saing pemuda dan olahraga, hal ini disebabkan :
   - Belum optimalnya penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemuda pemula
   - Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas pemuda pelopor
   - Terbatasnya SDM Keolahragaan yang berlisensi
   - Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi
   - Sarana dan Prasarana pengembangan pemuda dan olahraga belum merata
2. Belum optimalnya pembangunan kepariwisataan daerah, hal ini disebabkan :

- Belum optimalnya pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata
- Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung pariwisata
- Belum optimalnya strategi pemasaran dan promosi pariwisata
- Belum optimalnya pengembangan SDM pariwisata
- Belum optimalnya investasi dan pendanaan sektor pariwisata

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya daya saing kepemudaan dan Olahraga	Belum optimalnya pengembangan kepemudaan dan prestasi olahraga	Belum optimalnya peran pemuda di daerah
			Belum optimalnya pengem-bangan olahraga
2.	Belum optimalnya pembangunan kepariwisataan daerah	Belum optimalnya penguatan ekosistem pengembangan pariwisata daerah	Belum optimalnya pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata
			Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung pariwisata
			Belum optimalnya strategi pemasaran dan promosi pariwisata
			Belum optimalnya pengembangan SDM pariwisata
			Belum optimalnya investasi dan pendanaan sektor pariwisata

b. Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat digambarkan isu-isu strategis yang mendesak dan harus diselesaikan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagai berikut:

Tabel 2.14
Isu Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata Kabupaten Tabalong

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	KABUPATEN	
- Demografi Pemuda yang - Signifikan Minat wirausaha muda - Cabang Olahraga Unggulan Ketersediaan - infrastruktur dasar - Potensi wisata alam - Wisata Budaya dan Religi - Wisata Buatan dan Taman Desa Wisata - Desa Wisata	- Belum optimalnya pengembangan kepemudaan dan prestasi olahraga - Belum optimalnya penguatan ekosistem pengembangan pariwisata daerah	- Kesenjangan Sumber Daya Manusia (SDM) - Ekonomi tidak merata dan kurang inovasi - Kota tidak berkelanjutan	- **Perkembangan demografi global**. Penduduk dunia menjadi 9,45 miliar dan porsi lansia meningkat (Asia 55%) - **Geopolitik dan geoekonomi**. Eskalasi persaingan antar negara dan kemunculan kekuatan baru; serta kontribusi ekonomi negara berkembang mencapai 71% - **Perkembangan teknologi**. Teknologi akan menggantikan sekitar 40% pekerjaan saat ini - **Peningkatan urbanisasi dunia.** Penduduk perkotaan mencapai 65%; dan peranan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 70% - **Konstelasi perdagangan global.** Perdagangan global tumbuh 3,4% pertahun - **Tata kelola keuangan global.** Pergeseran	- Masih besarnya ketergantungan perekonomian daerah pada sektor hulu disertai lambatnya proses hilirisasi dan diversifikasi industri pengolahan berbasis sumber daya alam karena minimnya penciptaan lingkungan usaha industri yang kondusif, kurangnya dukungan intensif fiskal, dan rendahnya penguasaan teknologi serta keterbatasan pasokan energi, air, dan pangan - Masih kurangnya pusat-pusat pertumbuhan baru di pulau Kalimantan sebagai penggerak utama perekonomian wilayah serta belum meratanya pembangunan infrastruktur dan konektivitas pendukungnya. - Masih tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan di kawasan perdesaan, transmigrasi, dan	- Daya Saing Sumber daya Manusia (SDM yang masih rendah - Belum optimalnya Infrstruktur Dasar dan Perekonomian serta Konektivitas yang masih terbatas Pembangunan Perekonomian Berbasis Sumber Daya Alam (SDA) terbarukan yang masih belum kuat dan proses hilirisasi masih lambat - Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik yang belum Optimal	- Pengembangan kebudayaan dan pariwisata yang mendukung aktivitas ekonomi	- Belum optimalnya peran pemuda di daerah - Belum optimal pengembangan olahraga - Belum optimalnya pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur - pendukung pariwisata Ancaman terhadap warisan lokal

			kebijakan fiskal, Central Bank Digital Currency (CBDC), dan Fintech. - **Pertumbuhan kelas menengah (middle class).** Jumlah middle dan upper class lebih dari 90% (8,8 miliar). - **Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam.** Peningkatan peran ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persingan memperebutkan summber daya alam - **Perubahan iklim.** Peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana	perbatasan negara - Masih minimnya akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan serta saranan pengembangan - talenta tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri sehingga menyebabkan rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia. - Tingginya konversi hutan menjadi lahan tidak produktif dapat mengancam kerusakan ekosistem alami seperti hutan hujan tropis Kalimantan, flora dan faun endemik seperti orangutan dan bekantan serta warisan geologi dan keanekaragaman geologi lainnya			

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai misi , memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Tabalong periode 2025 – 2029 yaitu ***Menuju Tabalong SMaRT (Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan)*** dengan makna sebagai berikut :

- *Kabupaten Tabalong Sejahtera,*

  Menggambarkan kondisi masyarakat Tabalong yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memiliki akses yang baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang stabil
- *Kabupaten Tabalong Maju,*

  Menunjukkan Kabupaten Tabalong berupaya untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya untuk mewujudkan kemajuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia.
- *Kabupaten Tabalong Religius,*

  Tabalong berkomitmen untuk menjaga dan mengembangkan kehidupan sosial yang harmonis, berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan yang kuat dengan menegaskan pentingnya nilai-nilai agama dalam semua aspek kehidupan
- *Kabupaten Terdepan,*

  Tabalong bercita-cita untuk menjadi pelopor, menjadi yang terbaik atau unggul dalam berbagai aspek baik dalam hal pelayanan publik, inovasi, pendidikan, maupun pembangunan berkelanjutan.

Atau dengan makna secara keseluruhan, "TABALONG SMaRT" adalah visi untuk menciptakan sebuah daerah yang sejahtera, berkembang dengan pesat, memiliki landasan religius yang kuat, dan selalu berada di garis terdepan dalam inovasi dan kemajuan. Visi ini mencerminkan Kabupaten Tabalong untuk menjadi daerah yang holistik dalam pembangunan, di mana kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah, nilai-nilai religius, dan posisi unggul dalam berbagai aspek kehidupan menjadi fokus utama

Sedangkan Pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong dilaksanakan melalui 4 (empat) misi, yaitu:

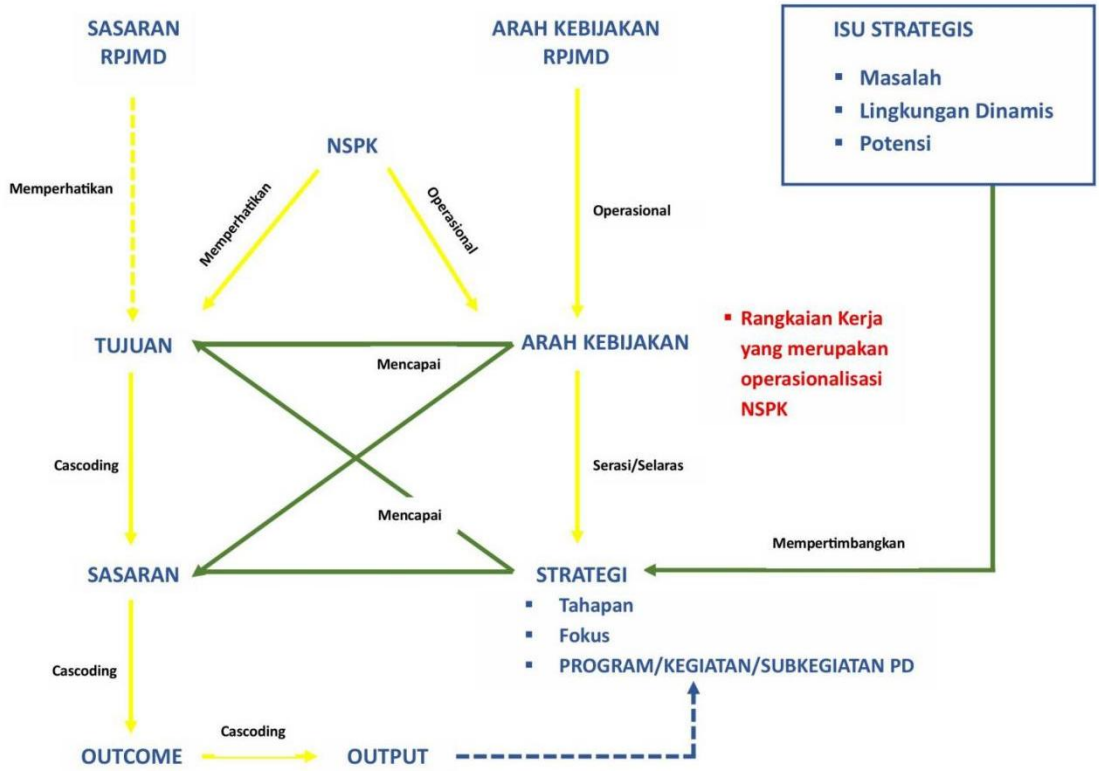
1. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera
2. Mendorong Kemajuan Daerah
3. Mengembangkan Kehidupan yang Religius
4. Menjadi Daerah yang Terdepan

Sesuai amanat dalam RPJMD tmisi yang sesuai dengan tugas pokok fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong yaitu misi I dan misi III, yaitu :

Misi I	:	***Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera***
sasaran	:	*-Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan produktif'.*
Misi III	:	***Mengembangkan kehidupan yang religius***
Sasaran	*:*	*-Bekembangnya sektor unggulan daerah* *-Meningkatnya kemajuan kebudayaan.* *-Meningkatnya pengarusutamaan gender dlam pembangunan*

Berdasarkan misi yang harus diemban maka Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029 menetapkan **tujuan** yaitu " **Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga dan meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif "**

3.1 Konsep Renstra PD



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

2. Sasaran Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata

Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang ingin dicapai maka diuraikan melalui sasaran, secara rinci sasaran jangka menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong yang ingin dicapai untuk periode tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan daerah
2. Meningkatnya prestasi atlet daerah di tingkat regional dan nasional
3. Meningkatnya pengembangan kepramukaan dalam pembentukan karakter dan kepemimpinan
4. Meningkatnya kunjungan wisatawan melalui penguatan promosi dan pemasaran pariwisata daerah
5. Meningkatnya Kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah
6. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah

A. Kerengka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daeah untuk 5 (lima) tahun yang memuat vivi, misi kepala daerah, tujuan dan sasaran daerah dan arah kebijakan pembangunan.

Renstra (Rencana Strategis Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan SKPD selama 5 (lima) tahun yang harus selaras dan mendukung RPJMD.

Penjelasan hubungan atau keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD sebagai berikut :

a. Keterkaitan ini diatur dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017, yang mengharuskan Renstra PD menjabarkan sasaran RPJMD sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan PD
b. Sasaran RPJMD menjadi acuan dalam merumuskan sasaran Renstra PD
c. Tujuan Renstra PD dibentuk untuk mencapai sasaran Renstra, yang pada akhirnya mendukung sasaran RPJMD
d. Program kegiatan mendukung sasaran dan program prioritas RPJMD

Keterkaitan sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dapat digambarkan dalam kerangka sebagai berikut :

Tabel 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM
Menuju Tabalong SMaRT (Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan)	**Misi I : Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera**	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan produktif	- Rasio Wirausaha Pemuda - Peningkatan Prestasi Olahraga - Persentase Atlet yang masuk Pelatnas - Peningkatan Prestasi Olahraga - Persentase Atlet yang masuk Pelatnas	- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan - Prorgam Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan - Prorgam Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
	Misi III: Mengembangkan Kehidupan yang Religius	Meningkatnya perekonomian berbasis potensi unggulan daerah yang inklusif	Berkembangnya sektor unggulan daerah	- Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan - Persentase peningkatan media Pemasaran Pariwisata - Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif -	- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata - Program Pemasaran Pariwisata - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	- Rasio Wirausaha Pemuda	- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

B. Perumusan Tujuan dan Sasaran Restra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi aktual dan tantangan strategis yang dihadapi selama periode perencanaan. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk menjawab permasalahan yang teridentifikasi, sekaligus mendukung visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2030.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa prestasi olahraga daerah masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing ditingkat regional dan nasional, masih rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan serta keterbatasan akses pengembangan kewirausahaan pemuda menjadi kondisi yang harus diperbaiki. Selain itu kondisi saat ini, pengembangan destinasi wisata masih menghadapi keterbatasan pada infrastruktur pendukung, promosi, dan daya tarik yang berkelanjutan. Dibawah ini disajikan teknik merumuskan tujuan dan sasaran rancangan renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA											
- Berkembangnya Sektor Unggulan Daerah - Meningkatnya kemajuan kebudayaan - Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat - Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Produktif - Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan - Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan bersih	Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga serta Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)	57.83	60.33	62.83	65.33	67.83	70.33	72.83	
			Indeks Partisipasi	30	30	30	40	40	45	47	

			Olahraga (%)							
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0.014	0.015	0.016	0.017	0.018	0.019	0.020
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	BB	BB	BB	A	A
		Meningkatnya pemuda dalam pembangunan daerah	Rasio Wirausaha Pemuda (%)	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00
		Meningkatnya Prestasi Atlet Daerah di Tingkat Regional dan Nasional	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda (%)	16	16	16	17	17	17.5	17.5
		Meningkatnya pengembangan kepramukaan dalam dalam pembentukan karakter dan kepemimpinan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (%)	89	91	93	94	95	97	98
		Meningkatnya kunjungan wisata melalui penguatan promosi dan pemasaran pariwisata daerah	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)	2.50	3.75	5	6.25	7.5	8.75	10
		Meningkatnya kontribusi	Persentase Pelaku	-	-	2	3	4	5	6

		sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)								

3. Strategi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025 - 2029

Strategi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/ upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan sasaran Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Langkah-langkah yang dilakukan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam upaya mewujudkan masyarakat Tabalong yang sejahtera diperlukan langkah strategis dan program prioritas yang harus dilaksanakan, diantaranya :

1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat
   - Melalui Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta menyediakan pelatihan ketrampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, pengembangan SDM yang kompeten dan terampil adalah kunci untuk mendukung kemajuan daerah, untuk mendukung terwujudnya 15.000 tenaga kerjaterampil
   - Melalui program beasiswa dan pendidikan Vokasi dengan Kapasitas Daya Saing Kepemudaanmenyediakan beasiswa untuk pendidikan lanjutan serta program pendidikan vokasi yang fokus pada ketrampilan teknis yang dibutuhkan di industri-industri yang berkembang di tabalong. Program pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan mendukung Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam hal melakuka kerjasama dengan perguruan tinggi dan memberikan beasiswa bagi 1.000 orang pemuda/ pemudi agar bisa melanjutkan kualiah
2. Penguatan Ekonomi Lokal
   - Membangun infrastruktur pendukung pariwisata dan percepatan pengembangan kawasan industri (KI) seradang
3. Pengembangan pariwisata dan kebudayaan

- Melalui Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, pemerintah daerah berfokus pada pengelolaan destinasi wisata secara berkelanjutan, pengembangan infrastruktur penunjang, serta promosi terpadu yang mengangkat keunikan darah. Festival kebudayaan, pelestarian seni tradisional, dan pemberdayaan komunitas lokal menjadi langkah strategi untuk memperkuat identitas Tabalong sebagai wilayah yang kaya akan warisan budaya. Melalui kolaborasi dengan masyarakat dan berbagai pihak, pengembangan sektor pariwisata ini tidak hanya meningkatkan perekonomian lokal, tetapi juga memperkokoh posisi Tabalong sebgai daerah yang maju, ramah, dan mampu bersaing di tingkat global
- Melalui Program Pemasaran Pariwisata strategi yang dilakukan adalah :
  a. Mengembangkan dan mempromosikan destinasi wisata unggulan di Tabalong, seperti wisata alam, budaya, religi, yang dapat menarik wisatawan domestik dan internasional
  b. Mengadakan penyelenggaraan Event wisata tahunan yang melibatkan budaya lokal dan daya tarik wisata untuk menarik pengunjung dan meningkatkan profil daerah.
  c. Mempromosikan pariwisata dengan menggunakan media digital dan kampanye online untuk mempromosikan Tabalong sebagai destinasi wisata, serta menarik minat wisata gobal.
- Melalui Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat mendorong industri kreatif lokal seperti seni, kerajinan tangan, kuliner, dan produk budaya lainnya untuk menjadi bagian integral dari ekonomi daerah. Dukungan terhadap industri kreatif dapat meningkatkan daya tarik daerah dan menciptakan peluang ekonomi baru.

A. **Penahapan Pembangunan**

Penahapan Pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Penahapan Renstra Dinas

Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata dapat disajikan seprti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4 Penahapan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan kapasitas dan daya saing kepemudaan	Percepatan Peningkatan kapasitas dan daya saing kepemudaan	Perluasan Peningkatan kapasitas dan daya saing kepemudaan	Penguatan kapasitas dan daya saing kepemudaan	Pemantapan kapasitas dan daya saing kepemudaan
Peningkatan prestasi atlet daerah di tingkat regional dan nasional	Percepatan Peningkatan prestasi atlet daerah di tingkat regional dan nasional	Perluasan Peningkatan prestasi atlet daerah di tingkat regional dan nasional	Penguatan prestasi atlet daerah di tingkat regional dan nasional	Pemantapan prestasi atlet daerah di tingkat regional dan nasionali
Peningkatan pengembangan kapasitas kepramukaaan	Percepatan pengembangan kapasitas kepramukaaan	Perluasan pengembangan kapasitas kepramukaaan	Penguatan pengembangan kapasitas kepramukaaan	Pemantapan pengembangan kapasitas kepramukaaan
Peningkatan daya tarik dan pemasaran	Percepatan Peningkatan daya tarik dan pemasaran	Perluasan Peningkatan daya tarik dan pemasaran	Penguatan daya tarik dan pemasaran	Pemantapan daya tarik dan pemasaran
Peningkatan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Percepatan Peningkatan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Perluasan Peningkatan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Penguatan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Pemantapan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif

Pengembangan ekosistem riset dan inovasi merupakan landasan penting dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Strategi pengembangan riset dan inovasi di Kabupaten Tabalong disusun sebagai prakarsa strategis untuk mendukung dua tujuan utama: yaitu pengembangan produk unggulan daerah (PUD) dan penyelesaian permasalahan prioritas daerah dalam jangka menengah. Pertama, strategi riset dan inovasi diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor unggulan daerah, yakni pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif, melalui pengembangan produk-produk unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi dan potensi pasar yang kuat. Pendekatan ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan menciptakan wirausaha baru berbasis inovasi, meningkatkan produktivitas dan kualitas produk lokal, serta memperkuat kapasitas kelembagaan dan pelaku usaha di daerah. Kedua, strategi ini juga difokuskan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan utama daerah, khususnya yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti kemiskinan dan pengangguran, serta transformasi ekonomi dari sektor ekstraktif menuju pengambangan sektor agraris.

Fokus pengembangan PUD ini diarahkan pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif, sementara penyelesaian permasalahan prioritas daerah difokuskan pada penyelesaian ketimpangan kesejahteraan masyarakat dan kebutuhan pergeseran struktur ekonomi dari ketergantungan pada sektor ekstraktif menuju ekonomi berbasis agraris yang lebih berkelanjutan, inklusif dan bernilai tambah.

Matriks Rencana Aksi / Langkah-langkah Strategis Pengembangan Sektor/Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Tabalong

No	Sub Elemen	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
	PUD ke-3: Pengembangan PUD Sektor Pariwisata								
1	**Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah**								
a	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Regulasi terkait pengembangan riset dan inovasi di sektor pariwisata (Perda, Perkada, regulasi lain yang mendukung promosi, pengembangan destinasi, dan inovasi wisata)	Menyusun draft Perda/Perkada riset dan inovasi sektor pariwisata	Mengesahkan Perda/Perkada dan sosialisasi kepada pelaku usaha serta pemangku kepentingan	Memperkuat pembinaan dan monitoring implementasi regulasi	Evaluasi dan revisi regulasi berdasarkan masukan pelaku usaha dan stakeholder	Pengembangan regulasi lanjutan untuk mendukung inovasi spesifik dan promosi wisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	Berkoordinasi dengan Bagian Hukum
b	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Fasilitas riset dan inkubasi inovasi di bidang pariwisata, ruang kreatif pengembangan produk wisata, pusat pelatihan SDM pariwisata	Penyusunan anggaran dan perencanaan pembangunan fasilitas	Pembangunan dan pengoperasian awal fasilitas riset dan pelatihan	Pelaksanaan program pelatihan dan inkubasi inovasi secara berkala	Pengembangan kapasitas dan kemitraan pengelolaan fasilitas	Evaluasi dan ekspansi fasilitas sesuai kebutuhan pengembangan sektor	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah; Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Berkoordinasi dengan dinas teknis lainnya
c	Pengelolaan kebun raya daerah (jika ada)	(Jika relevan) Pengembangan kawasan konservasi alam dan taman wisata alam sebagai lokasi riset dan wisata	Penyusunan rencana pengelolaan konservasi dan wisata alam	Penguatan kapasitas Pokdarwis dan pengelola kawasan konservasi	Pelaksanaan program konservasi dan pengembangan taman wisata	Upaya pengakuan geopark oleh UNESCO dan promosi destinasi	Integrasi dan pengembangan destinasi berbasis konservasi secara berkelanjutan	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	Berkoordinasi dengan dinas teknis lainnya

2	**Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi**								
a	Penyediaan sarana pendukung riset yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Fasilitas uji coba produk wisata baru, platform informasi inovasi pariwisata, pengembangan klaster produk wisata unggulan	Pengembangan fasilitas uji coba produk wisata	Pembangunan dan pengelolaan platform informasi inovasi	Inisiasi pembentukan klaster produk wisata unggulan	Penguatan kelembagaan dan pengembangan klaster	Ekspansi klaster dan integrasi dengan promosi produk wisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	Berkoordinasi dengan dinas teknis lainnya
3	**Kemitraan Riset dan Inovasi**								
a	Peningkatan difusi inovasi	Transfer teknologi dan praktik terbaik dalam pengelolaan destinasi dan pelayanan wisata	Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis bagi Pokdarwis dan pelaku wisata	Pengembangan modul pelatihan berbasis teknologi dan praktik terbaik	Pembentukan komunitas belajar dan sharing inovasi	Penguatan jejaring komunitas inovasi wisata	Evaluasi dampak difusi inovasi dan pembaruan program pelatihan	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	Berkoordinasi dengan dinas teknis lainnya
b	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Pelatihan dan pendampingan inovasi layanan dan produk wisata kepada pelaku usaha	Workshop inovasi produk wisata secara rutin	Program pendampingan intensif pelaku usaha wisata	Pengembangan jaringan komunikasi hasil riset dan inovasi	Penguatan jejaring dan dukungan kolaborasi	Evaluasi hasil pendampingan dan pengembangan jaringan	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	Berkoordinasi dengan dinas teknis lainnya
4	**Budaya Riset dan Inovasi**								
a	Promosi dan kampanye inovasi	Kampanye inovasi pariwisata di media, sekolah, dan komunitas	Pengembangan program edukasi pariwisata inovatif	Pelibatan pelajar dan komunitas dalam promosi dan pengembangan	Pendampingan komunitas kreatif dalam produksi konten	Kemitraan dengan media lokal dan platform digital	Evaluasi efektivitas kampanye dan pengembangan konten kreatif	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	Berkoordinasi dengan dinas teknis lainnya

b	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Inkubasi bisnis wisata baru, pelatihan manajemen dan teknologi bagi pelaku usaha pariwisata	Penyusunan program inkubasi dan pelatihan manajemen usaha	Pelaksanaan pelatihan dan inkubasi bisnis wisata	Fasilitasi kolaborasi startup dengan pelaku usaha mapan	Pengembangan komunitas wirausaha pariwisata	Evaluasi dan pengembangan program inkubasi dan jejaring	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	Berkoordinasi dengan dinas teknis lainnya
5	**Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah**								
a	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Sinkronisasi regulasi dan program pusat dengan kebijakan daerah dalam pengembangan pariwisata	Koordinasi rutin dengan Kemenpar dan instansi pusat	Penyusunan regulasi daerah yang sesuai kebijakan nasional	Integrasi RIPPARDA dengan RIPARNAS dan rencana strategis terkait	Monitoring keselarasan kebijakan pusat-daerah	Penyesuaian kebijakan berdasarkan evaluasi bersama	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	Berkoordinasi dengan dinas teknis lainnya
6	**Penyelarasan dengan Perkembangan Global**								
a	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Adaptasi tren wisata global, isu keberlanjutan dan ekowisata	Integrasi prinsip keberlanjutan dalam pengembangan destinasi	Pelatihan dan sosialisasi isu ekowisata	Pengembangan destinasi wisata berorientasi ekowisata	Penguatan kolaborasi dan advokasi isu keberlanjutan	Evaluasi dan peningkatan kesadaran isu global	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	Berkoordinasi dengan dinas teknis lainnya
	PUD ke-4: Pengembangan PUD Sektor Industri Kreatif								
1	**Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah**								

a	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Regulasi terkait pengembangan riset dan inovasi di sektor industri kreatif (Perda, Perkada, regulasi yang mendukung hak cipta, perlindungan karya, dan pengembangan ekosistem kreatif)	Penyusunan dan konsultasi draft Perda/Perkada terkait riset, inovasi, dan perlindungan karya industri kreatif	Penetapan Perda/Perkada dan sosialisasi kepada pelaku kreatif dan OPD terkait	Koordinasi lintas OPD untuk integrasi kebijakan dan pembentukan forum komunikasi kebijakan	Penguatan pembinaan dan monitoring implementasi regulasi	Evaluasi dan penyempurnaan regulasi berdasar masukan stakeholder	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	Berkoordinasi dengan Bagian Hukum
b	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Fasilitas inkubasi dan coworking space untuk pelaku industri kreatif, ruang kreatif, pusat pelatihan keterampilan digital dan seni	Pembangunan Ruang Kreatif dan pusat pelatihan serta fasilitas inkubasi	Pengoperasian fasilitas dan pelaksanaan pelatihan keterampilan digital dan seni	Pengembangan program kolaborasi inovasi antar pelaku usaha, komunitas, dan akademisi	Fasilitasi event, pameran, dan pengembangan jejaring ekosistem kreatif	Evaluasi dan pengembangan fasilitas dan program berkelanjutan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah; Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Berkoordinasi dengan dinas teknis lainnya
c	Pengelolaan kebun raya daerah (jika ada)	(Jika relevan) Pengembangan ruang terbuka atau taman budaya untuk riset dan pameran karya kreatif	Perencanaan dan pembangunan taman budaya atau ruang terbuka kreatif	Pelibatan komunitas seni dan pelaku kreatif dalam pengelolaan ruang	Pelaksanaan program festival seni, pameran karya, dan workshop rutin	Integrasi taman budaya dengan tata ruang kota dan pengembangan pariwisata	Pengembangan fungsi ruang publik dan destinasi wisata secara berkelanjutan	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	Berkoordinasi dengan dinas teknis lainnya

2	**Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi**								
a	Penyediaan sarana pendukung riset yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Fasilitas prototyping, laboratorium kreatif, platform pemasaran dan distribusi produk kreatif	Peningkatan fasilitas laboratorium kreatif dan peralatan prototyping	Pengembangan platform pemasaran dan distribusi digital produk kreatif	Pelatihan pemanfaatan sarana riset dan pemasaran digital	Optimalisasi sarana dan platform pendukung pengembangan produk	Evaluasi sarana dan peningkatan kapasitas pelaku usaha	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	Berkoordinasi dengan dinas teknis lainnya
3	**Kemitraan Riset dan Inovasi**								
a	Peningkatan difusi inovasi	Transfer teknologi dan praktik terbaik dalam produksi dan pemasaran produk kreatif	Pelatihan dan pendampingan intensif oleh pakar dan praktisi profesional	Workshop dan seminar teknologi dan praktik terbaik produksi dan pemasaran	Pengembangan jaringan komunikasi dan platform berbagi pengetahuan	Penguatan komunitas penyebar inovasi	Evaluasi dampak difusi inovasi dan pembaruan program pelatihan	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	Berkoordinasi dengan dinas teknis lainnya
b	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Workshop, seminar, dan pelatihan bagi pelaku industri kreatif	Pengembangan program pelatihan dan pendampingan inovasi untuk subsektor kurang terlayani	Kolaborasi lembaga riset, perguruan tinggi, dan pelaku usaha kreatif	Pelaksanaan workshop dan seminar rutin	Memfasilitasi akses program pendampingan berkelanjutan	Evaluasi hasil pelatihan dan pengembangan program	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	Berkoordinasi dengan dinas teknis lainnya
4	**Budaya Riset dan Inovasi**								

a	Promosi dan kampanye inovasi	Kampanye kreatif di media dan komunitas, pameran seni dan teknologi kreatif	Pembentukan komunitas kampanye kreatif dan pelibatan media	Pengembangan konten kampanye inovatif di berbagai platform	Penyelenggaraan pameran seni dan teknologi kreatif secara berkala	Penguatan jejaring komunitas kreatif dan media	Evaluasi efektivitas kampanye dan pengembangan konten	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	Berkoordinasi dengan dinas teknis lainnya
b	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Inkubasi startup kreatif, pelatihan bisnis dan teknologi bagi wirausaha kreatif	Pengembangan kemitraan dengan perusahaan swasta, inkubator, komunitas	Pelaksanaan program inkubasi dan pelatihan bisnis dan teknologi	Fasilitasi akses pasar, modal, dan pendampingan startup kreatif	Pengembangan komunitas wirausaha kreatif	Evaluasi dan peningkatan program inkubasi	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	Berkoordinasi dengan dinas teknis lainnya
5	**Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah**								
a	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah terkait pengembangan industri kreatif	Penyusunan dan penguatan regulasi bersama pusat dan daerah	Pembentukan forum komunikasi dan koordinasi rutin pusat-daerah	Pengembangan sistem informasi terpadu data pengambilan keputusan	Monitoring dan evaluasi sinkronisasi kebijakan	Penyesuaian kebijakan berdasar hasil evaluasi	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	Berkoordinasi dengan dinas teknis lainnya
6	**Penyelarasan dengan Perkembangan Global**								

a	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Adaptasi tren global di bidang kreatif, perlindungan hak cipta internasional, dan inovasi digital	Pelatihan dan sosialisasi perkembangan inovasi kreatif global	Pendampingan hukum terkait hak kekayaan intelektual	Kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional	Integrasi isu internasional dalam kebijakan daerah	Evaluasi dan peningkatan kapasitas adaptasi isu global	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	Berkoordinasi dengan dinas teknis lainnya

Dalam rangka mewujudkan pembanguna daerah yang sejalan dengan arah pembangunan nasional dan komitmen global, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraa, dan Pariwisata aupaten Tabalong tahun 2025-2029 juga mengacu pada pencapaian Sustainable Develompen Goals(SDGs) atau ujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs merupakan agenda pembangunan global yag ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan terdiri atas 17 tujuan serta 16 targe yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelol pemrintah.

Sebagai perangkat daerah yang berperan dalam pembangunan bidang kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian beberapa tujuan SDSs, antara lain :

1. Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera (Good Health and Well-being).
2. Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas (Quality Education)
3. Tujuan 5 : Kesetaraan Gender (Gender Equality)
4. Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Decent Work and Economic Growth)
5. Tujuan 11 : Kota Permukiman yang berkelanjutan (Sustainable Cities and Communities)

Integrasi SDGs ke dalam Renstra ini menunjukakan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Dinas kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pembangunan daerah, tetapi juga turut berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan berkelanjutan secara nasional dan global. Gengan demikian, diharapkan arah kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra ini dapat menjadi instrumenefektif untuk mendorong pembangunan daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

4. Arah Kebijakan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata Kabupaten Tabalong Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025 - 2029

Arah kebijaan Renstra Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025 - 2029 adalah rangkaian kerja yag merupakan operasionalisas NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan periwisata dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
1	NSPK Kemenpora bidang sistem dan strategi pelayanan kepemudaan, meliputi : Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan makro bidang pelayanan kepemudaan : - Revisi Undang - Undang Kepemudaan - Revisi Undang - Undang Gerakan Pramuka - Perpres Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan - Perumusan Desain Besar Kepemudaan Nasional (DBKN) - Regulasi bidang pelayanan kepemudaan lainnya	Memberikan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu.	Be smart yaitu memberikan Beasiswa kepada pemuda/ pelajar Tabalong yang smart atau berprestasi baik akademik maupun non akademik	
2	Pengembangan pariwisata berbasis keberlanjutan sesuai UU No. 10/2009 tentang kepariwisataan mengedepankan	Mengembangkan destinasi wisata yang berkelanjutan serta mempromosikan budaya dan produk lokal.	Mengembangkan destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan ramah lingkungan berbasis potensi lokal	

	sapta pesona dan sadar wisata Parisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi			
	Destinasi berkelanjutan (aksesibilitas, atraksi, amenitas, konservasi) Kriteria even budaya yang layak dijadikan agenda tahunan Produk lokal yang masuk katalog promosi daerah	Mengembangkan destinasi wisata yang berkelanjutan serta mempromosikan budaya dan produk lokal	Pengembangan destinasi wisata daerah	
			Pengelolaan kawasan strategis pariwisata daerah	
		Pengembangan pariwisata pertanian (agrowisata).	Pengembangan pariwisata pertanian (agrowisata).	
		Mengembangkan dan meningkatkan kualitas destinasi wisata	Meningkatkan promosi pariwisata, budaya dan produk unggulan daerah melalui berbagai media , baik offline maupun digital	
		Penguatan ekosistem pariwisata berkelanjutan.	Mendorong pengembangan desa wisata, ekowisata, dan atraksi buaya berbasis kearifan lokal	
		Meningkatkan kapasitas SDM dalam manajemen pariwisata.	Memperkuat kualitas SDM pariwisata melalui pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan pelaku usaha pariwisata	
			Menigkatkan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	
		Meningkatkan kerjasama dengan Lembaga terkait dan komunitas lokal dalam riset dan inovasi pengembangan pariwisata.	Membangun kemitraan dengan dunia usaha, komunitas, dan stakeholder untuk mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan	
		Penyusunan regulasi yang mendukung investasi di sektor pariwisata	Menyusun Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA)	
		Pengawasan terhadap dampak lingkungan dan sosial akibat perkembangan pariwisata.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dampak lingkungan dan sosial pada destinasi wisata	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Program Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tabalong, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menetapkan program dan kegiatan yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan RPJMD. Program dan kegiatan ini diarahkan untuk menjawab isu strategis dibidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata sekaligus mendukung pengembangan daya saing daerah melalui sektor pariwisata yang berkelanjutan dan pelibatan pemuda dalam pembangunan.

Program Dinas Kepemudaan disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, sehingga setiap program dikaitkan dengan sasaran strategis, indikator kinerja, dan terget yang terukur. Program-program nya adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
6. Program Pemasaran Pariwisata
7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
8. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Prorgam-program tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					34.352.476.871		37.171.097.400		40.220.985.700		46.521.117.400		57.527.777.200	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.599.333.949		10.386.959.200		11.239.209.200		12.161.386.300		13.159.228.000	
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	100	9.599.333.949	100	10.386.959.200	100	11.239.209.200	100	12.161.386.300	100	13.159.228.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					8.454.168.395		9.147.832.900		9.898.412.500		10.710.577.200		11.589.380.000	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (%)	0,7	0,75	0,8	8.454.168.395	0,85	9.147.832.900	0,9	9.898.412.500	0,95	10.710.577.200	1	11.589.380.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (% Nilai)	0,14	0,45	0,76		1,06		1,37		1,67		1,98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Tingkat pemuda partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	117,18	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					15.093.974.527		16.332.435.100		17.672.511.300		22.122.540.800		31.127.297.500	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda (%)	16	16	16	15.093.974.527	17	16.332.435.100	17	17.672.511.300	17,5	22.122.540.800	17,5	31.127.297.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Peningkatan Prestasi Olahraga (% Indeks)	4	8	10		12		14		16		18		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					1.205.000.000		1.303.870.200		1.410.852.700		1.526.613.100		1.651.871.700	

Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (%)	89	91	93	1.205.000.000	94	1.303.870.200	95	1.410.852.700	97	1.526.613.100	98	1.651.871.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					4.514.330.629		4.884.731.300		5.285.523.400		5.719.200.500		6.188.460.700	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					1.549.139.488		1.676.169.300		1.814.032.200		1.963.617.000		2.125.885.500	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	4,52	5,98	7,44	1.549.139.488	8,9	1.676.169.300	10,37	1.814.032.200	11,83	1.963.617.000	13,29	2.125.885.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota (%)	1,25	1,67	2,25		1,68		3,25		1,69		4,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)	2,5	3,75	5		6,25		7,5		8,75		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					2.705.194.278		2.927.155.400		3.167.328.500		3.427.207.800		3.708.410.100	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Tingkat hunian akomodasi (%)	29,03	32,67	36,31	2.705.194.278	39,95	2.927.155.400	43,6	3.167.328.500	47,24	3.427.207.800	50,88	3.708.410.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku (%)	1,42	1,48	1,53		1,59		1,64		1,7		1,75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	25,15	29,76	34,37		38,97		43,58		48,19		52,79		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (%)	20	25	50		60		70		80		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					60.000.000		65.000.000		70.000.000		75.000.000		80.000.000	
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)	-	-	2	60.000.000	3	65.000.000	4	70.000.000	5	75.000.000	6	80.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata

3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					199.996.863		216.406.600		234.162.700		253.375.700		274.165.100	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (%)	-	-	20	199.996.863	40	216.406.600	60	234.162.700	80	253.375.700	100	274.165.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
TOTAL KESELURUHAN					38866807500.00		42055828700.00		45506509100.00		52240317900.00		63716237900.00	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA							
- Meningkatnya kemajuan kebudayaan - Berkembangnya Sektor Unggulan Daerah - Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan bersih - Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat - Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Produktif - Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga serta Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)		
					Indeks Partisipasi Olahraga (%)		
					Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)		

					Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)		
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah			Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)		
			Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah		Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.19.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.19.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.19.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.19.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.19.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*

					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.19.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.19.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.19.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.19.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.19.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.19.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.19.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.19.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib, mutakhir dan terdokumentasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.19.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.19.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.19.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.19.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.19.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	

					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.19.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.19.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.19.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.19.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.19.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.19.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.19.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.19.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.19.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.19.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.19.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.19.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.19.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.19.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.19.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.19.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.19.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.19.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.19.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.19.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.19.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.19.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.19.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.19.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.19.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan daerah			Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		
			Meningkatnya daya saing kepemudaan		Rasio Wirausaha Pemuda (%)	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
					Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (% Nilai)	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
					Tingkat pemuda partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	

				Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
					Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Orang)	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
					Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*

					Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
					Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	
					Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)	2.19.02.2.01.0012 - Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	
					Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	2.19.02.2.01.0013 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Orang)	2.19.02.2.01.0014 - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)	2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)	2.19.02.2.02.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Prestasi Atlet Daerah di Tingkat Regional dan Nasional			Jumlah Medali yang diperoleh (buah)		
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga		Persentase Atlet yang Masuk Pelatda (%)	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Peningkatan Prestasi Olahraga (% Indeks)	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

				Kabupaten/Kota			
					Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	2.19.03.2.02.0006 - Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	2.19.03.2.03.0006 - Seleksi Atlet Daerah	
					Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	2.19.03.2.03.0007 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*

					Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)	2.19.03.2.03.0010 - pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
					Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional (Dokumen)	2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
					Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional (Dokumen)	2.19.03.2.04.0005 - Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.19.03.2.04.0006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
					Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	2.19.03.2.05.0010 - Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	
		Meningkatnya Pengembangan kepramukaan dalam pembentukan karakter dan kepemimpinan			Persentase sekolah/pendidikan yang menyelenggarakan ekstrakurikuler pramuka (%)		
			Meningkatnya kualitas kepramukaan		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (%)	2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	

				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	2.19.04.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
					Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	2.19.04.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	
		Meningkatnya kunjungan wisatawan melalui penguatan promosi dan pemasaran pariwsata daerah			Jumlah kunjungan wisatawan (%)		
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota (%)	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
					Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
				Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)	3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)	3.26.02.2.02.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	

				Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.03.0008 - Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata		Tingkat hunian akomodasi (%)	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
					Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku (%)	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	

					Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (%)	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
				Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	3.26.03.2.01.0004 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	
					Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	3.26.03.2.01.0006 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)		
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif		Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)	3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
				Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif (Laporan)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÂ	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif (Laporan)	3.26.04.2.02.0003 - Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	

			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif		Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (%)	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
				Terlaksananya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
					Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	3.26.05.2.01.0009 - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.02.0001 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	

4.3 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan

Dalam rangka mewujudkan visi,misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong, maka disusn rencana program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan secara bertahap selama periode 2025-2030. Perencanaan ini disusun dengan memperhatikan prinsip efektifitas, efisiensi, serta sinergi dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

1. Program

Program yang merupakan kumpulan kegiatan yang saling terkait untuk mencapai sasaran strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Program ini diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Tabalong, khususnya dalam meningkatkan kualitas pemuda, memperkuat prestasi olahraga, serta mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan

2. Kegiatan

Kegiatan merupakan bagian dari program yang lebih spesifik untuk mancapai output tertentu. Setiap program memiliki beberapa kegiatan yang mendukung ketercapaian sasaran secara terukur.

3. Subkegiatan

Subkegiatan adalah bagian paling operasional yang mendukung pencapaian target kegiatan, dilaksanakan oleh unit kerja teknis. Subkegiatan mencakup kegiatan teknis lapangan, sosialisasi, pelatihan, hingga monitoring dan evaluasi.

4. Pendanaan

Pendanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan direncanakan secara realialitas dan proporsional, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Pendanaan bersumber dari APBD Kabupaten Tabalong.

Rencana program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut :

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				34.352.476.871		37.171.097.400		40.220.985.700		46.521.117.400		57.527.777.200		
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.599.333.949		10.386.959.200		11.239.209.200		12.161.386.300		13.159.228.000		
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	9.599.333.949	100	10.386.959.200	100	11.239.209.200	100	12.161.386.300	100	13.159.228.000	2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				277.823.150		299.104.648		323.754.229		350.425.075		379.282.932		
Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	277.823.150	1	299.104.648	1	323.754.229	1	350.425.075	1	379.282.932		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
2.19.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				67.065.320		72.564.676		78.514.980		84.953.208		91.919.371	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	67.065.320	2	72.564.676	2	78.514.980	2	84.953.208	2	91.919.371	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.19.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6.067.500		6.565.035		7.103.368		7.685.844		8.316.083		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	6.067.500	1	6.565.035	1	7.103.368	1	7.685.844	1	8.316.083		
2.19.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				6.067.500		6.565.035		7.103.368		7.685.844		8.316.083		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	6.067.500	1	6.565.035	1	7.103.368	1	7.685.844	1	8.316.083		
2.19.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				6.889.104		7.454.011		8.065.239		8.726.589		9.442.169		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	6.889.104	1	7.454.011	1	8.065.239	1	8.726.589	1	9.442.169		
2.19.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				6.824.320		7.383.914		7.989.395		8.644.526		9.353.377		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	6.824.320	1	7.383.914	1	7.989.395	1	8.644.526	1	9.353.377		
2.19.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				79.787.000		86.329.534		93.408.556		101.068.057		109.355.638		

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	79.787.000	1	86.329.534	1	93.408.556	1	101.068.057	1	109.355.638		
2.19.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				70.754.406		76.556.267		82.833.881		89.626.259		96.975.613		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	70.754.406	1	76.556.267	1	82.833.881	1	89.626.259	1	96.975.613		
2.19.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				17.184.000		18.593.088		20.117.721		21.767.374		23.552.299		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	17.184.000	1	18.593.088	1	20.117.721	1	21.767.374	1	23.552.299		
2.19.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				17.184.000		17.093.088		18.617.721		20.267.374		22.052.299		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2	2	17.184.000	2	17.093.088	2	18.617.721	2	20.267.374	2	22.052.299		
2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.131.644.000		6.634.315.808		7.178.206.704		7.766.696.654		8.403.442.780		
Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24	25	6.131.644.000	30	6.634.315.808	32	7.178.206.704	35	7.766.696.654	37	8.403.442.780		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	100	110		120		130		140		150			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.19.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.130.144.000		6.632.815.808		7.176.706.704		7.765.196.654		8.401.942.780		

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24	25	6.130.144.000	30	6.632.815.808	32	7.176.706.704	35	7.765.196.654	37	8.401.942.780		
2.19.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	100	110	500.000	120	500.000	130	500.000	140	500.000	150	500.000		
2.19.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	5	500.000	5	500.000	5	500.000	5	500.000	5	500.000		
2.19.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000		
2.19.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				222.896.000		294.132.472		260.864.335		292.214.210		305.314.775		
Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib, mutakhir dan terdokumentasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	11	10	222.896.000	10	294.132.472	17	260.864.335	20	292.214.210	22	305.314.775		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	-		30		-		30		-			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	-	25		30		32		35		37			
2.19.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0		60.000.000		0		60.000.000		0		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	-	0	30	60.000.000	-	0	30	60.000.000	-	0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.19.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		

Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	-	25	500.000	30	500.000	32	500.000	35	500.000	37	500.000	
2.19.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				222.396.000		233.632.472		260.364.335		231.714.210		304.814.775	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	11	10	222.396.000	10	233.632.472	17	260.364.335	20	231.714.210	22	304.814.775	
2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.139.239.151		1.124.759.629		1.236.529.264		1.386.686.611		1.565.922.935	
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	3	1.139.239.151	3	1.124.759.629	4	1.236.529.264	4	1.386.686.611	5	1.565.922.935	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	4		4		5		5		6		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	-	-		12		12		12		12		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	2		2		2		2		2		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	6		6		7		7		8		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30	60		60		65		65		70		
2.19.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.505.362		3.792.802		4.103.811		4.440.324		4.804.431	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	2	3.505.362	2	3.792.802	2	4.103.811	2	4.440.324	2	4.804.431	
2.19.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				496.557.136		487.274.821		581.331.356		569.000.528		680.578.571	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	6	496.557.136	6	487.274.821	7	581.331.356	7	569.000.528	8	680.578.571	
2.19.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				43.785.343		47.375.741		51.260.552		55.463.917		60.011.958	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	4	43.785.343	4	47.375.741	5	51.260.552	5	55.463.917	6	60.011.958	
2.19.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				33.952.310		38.683.999		41.856.087		45.288.287		49.001.926	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	3	33.952.310	3	38.683.999	4	41.856.087	4	45.288.287	5	49.001.926	

2.19.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0		479.868		1.038.563		1.685.671		2.431.919		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	-	-	0	12	479.868	12	1.038.563	12	1.685.671	12	2.431.919		
2.19.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				561.139.000		546.852.398		556.638.895		710.507.884		768.794.130		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30	60	561.139.000	60	546.852.398	65	556.638.895	65	710.507.884	70	768.794.130		
2.19.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				300.000		300.000		300.000		300.000		300.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	2	300.000	2	300.000	2	300.000	2	300.000	2	300.000		
2.19.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				41.084.648		94.494.589		48.184.145		147.176.245		56.495.697		
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	-	-	41.084.648	2	94.494.589	-	48.184.145	-	147.176.245	-	56.495.697		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	15		16		17		19		20			
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-		-		-		1		-			
2.19.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		50.000.000		0		0		0		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	-	-	0	2	50.000.000	-	0	-	0	-	0		
2.19.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				41.084.648		44.494.589		48.184.145		52.176.245		56.495.697		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	15	41.084.648	16	44.494.589	17	48.184.145	19	52.176.245	20	56.495.697		
2.19.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		95.000.000		0		
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	0	-	0	-	0	1	95.000.000	-	0		
2.19.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.613.877.000		1.746.214.914		1.889.404.537		1.949.335.709		2.211.971.238		

Tersedianya jasa penunjang kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.613.877.000	12	1.746.214.914	12	1.889.404.537	12	1.949.335.709	12	2.211.971.238		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	100	100		120		130		140		150			
2.19.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300.000		300.000		300.000		300.000		300.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	100	100	300.000	120	300.000	130	300.000	140	300.000	150	300.000		
2.19.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				13.250.000		14.336.500		15.512.093		16.784.085		18.160.380		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	13.250.000	12	14.336.500	12	15.512.093	12	16.784.085	12	18.160.380		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.19.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.600.327.000		1.731.578.414		1.873.592.444		1.932.251.624		2.193.510.858		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.600.327.000	12	1.731.578.414	12	1.873.592.444	12	1.932.251.624	12	2.193.510.858		
2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				172.770.000		193.937.140		302.265.986		268.851.796		236.797.643		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	-	172.770.000	-	193.937.140	-	302.265.986	1	268.851.796	-	236.797.643		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-		-		1		-		-			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	14		-		-		-		-			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	-	-		14		14		14		14			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	30		30		30		30		30			

2.19.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		168.126.300		178.125.657		192.731.960		208.535.981		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	-	-	0	14	168.126.300	14	178.125.657	14	192.731.960	14	208.535.981		
2.19.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				152.150.000		0		0		0		0		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	14	152.150.000	-	0	-	0	-	0	-	0		
2.19.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.620.000		25.810.840		24.140.329		26.119.836		28.261.662		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	30	20.620.000	30	25.810.840	30	24.140.329	30	26.119.836	30	28.261.662		
2.19.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		100.000.000		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	0	-	0	1	100.000.000	-	0	-	0		
2.19.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		50.000.000		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	-	0	-	0	-	0	1	50.000.000	-	0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				8.454.168.395		9.147.832.900		9.898.412.500		10.710.577.200		11.589.380.000		
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (%)	0,7	0,8	8.454.168.395	0,85	9.147.832.900	0,9	9.898.412.500	0,95	10.710.577.200	1	11.589.380.000	2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	Tingkat pemuda partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	117,18	100		100		100		100		100			

	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (% Nilai)	0,14	0,76		1,06		1,37		1,67		1,98			
2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				8.208.049.345		8.881.532.088		9.610.275.021		10.398.812.448		11.252.050.538		
Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Orang)	-	200	8.208.049.345	300	8.881.532.088	400	9.610.275.021	500	10.398.812.448	500	11.252.050.538		
	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)		2		2		2		2		2			
	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)	10	10		12		13		15		15			
	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	25	100		125		125		130		130			
	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	25	34		34		40		40		40			
2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota				135.000.064		146.070.069		158.047.815		171.007.736		185.030.370		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	25	100	135.000.064	125	146.070.069	125	158.047.815	130	171.007.736	130	185.030.370		
2.19.02.2.01.0012 - Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda				40.261.590		43.563.040		47.135.210		51.000.297		55.182.321		
Terlaksananya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)	10	10	40.261.590	12	43.563.040	13	47.135.210	15	51.000.297	15	55.182.321		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*

2.19.02.2.01.0013 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota				225.114.165		243.573.527		263.546.556		285.157.373		308.540.278		
Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)		2	225.114.165	2	243.573.527	2	263.546.556	2	285.157.373	2	308.540.278		
2.19.02.2.01.0014 - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota				7.769.673.700		8.407.209.640		9.097.058.132		9.843.511.774		10.651.215.209		
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Orang)	-	200	7.769.673.700	300	8.407.209.640	400	9.097.058.132	500	9.843.511.774	500	10.651.215.209		
2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota				37.999.826		41.115.812		44.487.308		48.135.268		52.082.360		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	25	34	37.999.826	34	41.115.812	40	44.487.308	40	48.135.268	40	52.082.360		
2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				246.119.050		266.300.812		288.137.479		311.764.752		337.329.462		
Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)	100	80	246.119.050	80	266.300.812	80	288.137.479	80	311.764.752	80	337.329.462		
2.19.02.2.02.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota				246.119.050		266.300.812		288.137.479		311.764.752		337.329.462		
Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)	100	80	246.119.050	80	266.300.812	80	288.137.479	80	311.764.752	80	337.329.462		
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				15.093.974.527		16.332.435.100		17.672.511.300		22.122.540.800		31.127.297.500		
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda (%)	16	16	15.093.974.527	17	16.332.435.100	17	17.672.511.300	17,5	22.122.540.800	17,5	31.127.297.500	2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	Peningkatan Prestasi Olahraga (% Indeks)	4	10		12		14		16		18			

2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				6.705.104.825		7.254.923.421		7.849.827.141		9.826.413.615		13.825.763.957		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	8	6	6.705.104.825	6	7.254.923.421	7	7.849.827.141	8	9.826.413.615	9	13.825.763.957		
2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota				6.705.104.825		7.254.923.421		7.849.827.141		9.826.413.615		13.825.763.957		
Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	8	6	6.705.104.825	6	7.254.923.421	7	7.849.827.141	8	9.826.413.615	9	13.825.763.957		
2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.081.287.830		2.251.953.432		2.436.613.614		3.050.152.921		4.291.565.160		
Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	150	170	2.081.287.830	170	2.251.953.432	180	2.436.613.614	180	3.050.152.921	180	4.291.565.160		
	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	1	2		2		2		2		2			
2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				595.617.702		644.458.354		697.303.939		872.885.070		1.228.149.294		
Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	1	2	595.617.702	2	644.458.354	2	697.303.939	2	872.885.070	2	1.228.149.294		
2.19.03.2.02.0006 - Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				1.485.670.128		1.607.495.078		1.739.309.675		2.177.267.851		3.063.415.866		
Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	150	170	1.485.670.128	170	1.607.495.078	180	1.739.309.675	180	2.177.267.851	180	3.063.415.866		
2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				489.974.740		530.152.669		573.625.187		718.064.009		1.010.316.062		

Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	-	200	489.974.740	200	530.152.669	200	573.625.187	200	718.064.009	200	1.010.316.062		
	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	46	55		60		60		65		65			
2.19.03.2.03.0006 - Seleksi Atlet Daerah				111.134.490		120.247.518		130.107.815		162.868.962		229.156.630		
Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	-	200	111.134.490	200	120.247.518	200	130.107.815	200	162.868.962	200	229.156.630		
2.19.03.2.03.0007 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga				375.240.250		406.009.951		439.302.766		549.919.203		773.736.319		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	46	55	375.240.250	60	406.009.951	60	439.302.766	65	549.919.203	65	773.736.319		
2.19.03.2.03.0010 - pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota				3.600.000		3.895.200		4.214.606		5.275.844		7.423.113		
Tersedianya data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)	-	1	3.600.000	1	3.895.200	1	4.214.606	1	5.275.844	1	7.423.113		
2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				5.467.604.400		5.916.702.622		6.402.688.760		8.014.976.945		11.277.955.154		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional (Dokumen)	-	1	5.467.604.400	1	5.916.702.622	1	6.402.688.760	1	8.014.976.945	1	11.277.955.154		
	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
2.19.03.2.04.0005 - Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota				70.000.000		76.494.661		83.583.746		104.721.289		148.225.446		
Terlaksananya pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota sesuai standar nasional	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional (Dokumen)	-	1	70.000.000	1	76.494.661	1	83.583.746	1	104.721.289	1	148.225.446		

2.19.03.2.04.0006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait				5.397.604.400		5.840.207.961		6.319.105.014		7.910.255.656		11.129.729.708		
Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	4	5.397.604.400	4	5.840.207.961	4	6.319.105.014	4	7.910.255.656	4	11.129.729.708		
2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				350.002.732		378.702.956		409.756.598		512.933.310		721.697.167		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	1	1	350.002.732	1	378.702.956	1	409.756.598	1	512.933.310	1	721.697.167		
2.19.03.2.05.0010 - Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional				350.002.732		378.702.956		409.756.598		512.933.310		721.697.167		
Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	1	1	350.002.732	1	378.702.956	1	409.756.598	1	512.933.310	1	721.697.167		
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				1.205.000.000		1.303.870.200		1.410.852.700		1.526.613.100		1.651.871.700		
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (%)	89	93	1.205.000.000	94	1.303.870.200	95	1.410.852.700	97	1.526.613.100	98	1.651.871.700	2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2.19.04.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				1.205.000.000		1.303.870.200		1.410.852.700		1.526.613.100		1.651.871.700		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	1	1	1.205.000.000	1	1.303.870.200	1	1.410.852.700	1	1.526.613.100	1	1.651.871.700		
2.19.04.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah				1.205.000.000		1.303.870.200		1.410.852.700		1.526.613.100		1.651.871.700		
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	1	1	1.205.000.000	1	1.303.870.200	1	1.410.852.700	1	1.526.613.100	1	1.651.871.700		
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				4.514.330.629		4.884.731.300		5.285.523.400		5.719.200.500		6.188.460.700		

3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				1.549.139.488		1.676.169.300		1.814.032.200		1.963.617.000		2.125.885.500		
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	4,52	7,44	1.549.139.488	8,9	1.676.169.300	10,37	1.814.032.200	11,83	1.963.617.000	13,29	2.125.885.500	2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)	2,5	5		6,25		7,5		8,75		10			
	Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota (%)	1,25	2,25		1,68		3,25		1,69		4,25			
3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1.006.450.608		1.088.979.558		1.178.493.678		1.275.719.406		1.381.093.829		
Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)	7	4	1.006.450.608	4	1.088.979.558	4	1.178.493.678	5	1.275.719.406	5	1.381.093.829		
3.26.02.2.02.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1.006.450.608		1.088.979.558		1.178.493.678		1.275.719.406		1.381.093.829		
Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)	7	4	1.006.450.608	4	1.088.979.558	4	1.178.493.678	5	1.275.719.406	5	1.381.093.829		
3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				542.688.880		587.189.742		635.538.522		687.897.594		744.791.671		
Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	5	2	542.688.880	2	587.189.742	2	635.538.522	3	687.897.594	3	744.791.671		
	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	4	4		4		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				191.010.640		206.673.512		223.662.075		242.114.196		262.112.829		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*

Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	4	4	191.010.640	4	206.673.512	5	223.662.075	5	242.114.196	5	262.112.829		
3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				271.527.040		293.792.257		317.941.981		344.172.194		372.600.817		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	5	2	271.527.040	2	293.792.257	2	317.941.981	3	344.172.194	3	372.600.817		
3.26.02.2.03.0008 - Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota				80.151.200		86.723.973		93.934.466		101.611.204		110.078.025		
Tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota (Dokumen)	1	1	80.151.200	1	86.723.973	1	93.934.466	1	101.611.204	1	110.078.025		
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				2.705.194.278		2.927.155.400		3.167.328.500		3.427.207.800		3.708.410.100		
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku (%)	1,42	1,53	2.705.194.278	1,59	2.927.155.400	1,64	3.167.328.500	1,7	3.427.207.800	1,75	3.708.410.100	2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	Tingkat hunian akomodasi (%)	29,03	36,31		39,95		43,6		47,24		50,88			
	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (%)	20	50		60		70		80		90			
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	25,15	34,37		38,97		43,58		48,19		52,79			
3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				2.705.194.278		2.927.155.400		3.167.328.500		3.427.207.800		3.708.410.100		
Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	3	3	2.705.194.278	3	2.927.155.400	3	3.167.328.500	4	3.427.207.800	4	3.708.410.100		
	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	4	3		3		3		4		4			
3.26.03.2.01.0004 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				304.998.000		330.143.027		357.361.113		386.823.087		418.713.840		
Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	4	3	304.998.000	3	330.143.027	3	357.361.113	4	386.823.087	4	418.713.840		
3.26.03.2.01.0006 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota				2.400.196.278		2.597.012.373		2.809.967.387		3.040.384.713		3.289.696.260		

Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	3	3	2.400.196.278	3	2.597.012.373	3	2.809.967.387	4	3.040.384.713	4	3.289.696.260		
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				60.000.000		65.000.000		70.000.000		75.000.000		80.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)	-	2	60.000.000	3	65.000.000	4	70.000.000	5	75.000.000	6	80.000.000	2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÂ				60.000.000		65.000.000		70.000.000		75.000.000		80.000.000		
Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif (Laporan)	1	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000		
3.26.04.2.02.0003 - Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan				60.000.000		65.000.000		70.000.000		75.000.000		80.000.000		
Terfasilitasinya Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif (Laporan)	1	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000		
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				199.996.863		216.406.600		234.162.700		253.375.700		274.165.100		
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (%)	-	20	199.996.863	40	216.406.600	60	234.162.700	80	253.375.700	100	274.165.100	2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				99.997.025		108.196.781		117.068.917		126.668.568		137.055.391		
Terlaksananya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	-	100	99.997.025	100	108.196.781	100	117.068.917	100	126.668.568	100	137.055.391		
3.26.05.2.01.0009 - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata				99.997.025		108.196.781		117.068.917		126.668.568		137.055.391		
Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	-	100	99.997.025	100	108.196.781	100	117.068.917	100	126.668.568	100	137.055.391		

3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				99.999.838		108.209.819		117.093.783		126.707.132		137.109.709		
Terlaksananya Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	-	100	99.999.838	100	108.209.819	100	117.093.783	100	126.707.132	100	137.109.709		
3.26.05.2.02.0001 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				99.999.838		108.209.819		117.093.783		126.707.132		137.109.709		
Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	-	100	99.999.838	100	108.209.819	100	117.093.783	100	126.707.132	100	137.109.709		

4.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD)merupakan tolak ukur pencapaian sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tabalong. IKD digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja perangkat daerah berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Penyajian IKD dibagi menjadi 5 (lima) kelompok, yakni Aspek Geografi dan Demografi; Aspek Kesejahteraan Masyarakat; Aspek Daya Saing; Aspek Pelayanan Umum, dan Indikator Kinerja Kunci. Setiap indikator dilengkapi dengan target per tahun sampai tahun 2030. Indikator Kinerja Daerah yang telah ditetapkan RPJMD untuk dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah Indeks Pembangunan Pemuda, sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut :

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA										
I	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	57,83	60,33	62,83	65,33	67,83	70,33	72,83	
II	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	% Nilai	0,14	0,45	0,76	1,06	1,37	1,67	1,98	
2	Peningkatan Prestasi Olahraga	% Indeks	4	8	10	12	14	16	18	
3	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	4,52	5,98	7,44	8,9	10,37	11,83	13,29	
4	Tingkat hunian akomodasi	%	29,03	32,67	36,31	39,95	43,6	47,24	50,88	
5	Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota	%	1,25	1,67	2,25	1,68	3,25	1,69	4,25	
6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	1,42	1,48	1,53	1,59	1,64	1,7	1,75	
7	Tingkat pemuda partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	117,18	100	100	100	100	100	100	
8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	25,15	29,76	34,37	38,97	43,58	48,19	52,79	

4.4 Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tabalong, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menetapkan beberapa sub kegiatan prioritas yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan sektor pariwisata, kepemudaan, dan olahraga. Subkegiatan ini dipilih berdasarkan urgensi, keterkaitan dengan isu strategis daerah, serta kontribusinya terhadap peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Subkegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah tersebut dapat dilihat pada tabel 4.4

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS
DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA				
1.	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya daya saing kepemudaan	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
			2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	
			2.19.02.2.01.0014 - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	
2.	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.19.03.2.02.0006 - Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	
			2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
			2.19.03.2.03.0006 - Seleksi Atlet Daerah	
			2.19.03.2.03.0007 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	

			2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
			2.19.03.2.05.0010 - Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	
3.	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.02.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.03.0008 - Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	
4.	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
			3.26.03.2.01.0004 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	
			3.26.03.2.01.0006 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
5.	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
			3.26.05.2.01.0009 - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	
			3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
			3.26.05.2.02.0001 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	

4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong

Indikator Kinerja Itama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai pencapaian pencapaian tujuan strategis Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD. IKU disusun untuk menggambarkan kinerja utama yang menjadi prioritas dan fokus perhatian dalam periode perencanaan. IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut :

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA									
2.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,14	0,45	0,76	1,06	1,37	1,67	1,67	
3.	Jumlah medali yang diperoleh	buah	46	50	53	55	57	60	275	
4.	Persentase sekolah/pendidikan yang menyelenggarakan ekstrakurikuler pramuka	%	89	91	93	94	95	97	97	
5.	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	879,360	890,325	901,482	912.751	924.161	935.713	935.713	
6.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	25,15	29,76	34,76	38,97	43,58	48,19	39,052	
7.	Predikat Nlai AKIP	Predikat	BB	BB	BB	BB	A	A	A	

4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah seperangkat ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuannya. Dalam konteks pemerintahan , IKK berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan funsinya

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
2.	Peningkatan Prestasi Olahraga	positif	% Indeks	4	8	10	12	14	16	18	
3.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	positif	% Nilai	0,14	0,45	0,76	1,06	1,37	1,67	1,98	
4.	Tingkat pemuda partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	positif	%	117,18	100	100	100	100	100	100	
5.	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
6.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	positif	%	4,52	5,98	7,44	8,9	10,37	11,83	13,29	
7.	Tingkat hunian akomodasi	positif	%	29,03	32,67	36,31	39,95	43,6	47,24	50,88	
8.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	positif	%	1,42	1,48	1,53	1,59	1,64	1,7	1,75	

9.	Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota	positif	%	1,25	1,67	2,25	1,68	3,25	1,69	4,25	
10.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	positif	%	25,15	29,76	34,37	38,97	43,58	48,19	52,79	

BAB V

P E N U T U P

Pada Bab V ini memberikan penegasan terhadap keseluruhan substansi yang telah dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong. Dokumen ini menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata, sekaligus mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Tabalong 2025-2030

6.1 Kesimpulan Substansial

Renstra ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, indikator kinerja utama, serta program dan kegiatan yang disusun secara terukur, terarah, dan selaras dengan kebijakan nasional, provinsi, dan RPJM Kabupaten Tabalong.

Penyusunan Renstra ini juga memperhatikan prinsip keberllanjutan, keselarasan lintas sektor, serta optimalisasi sumber daya yang ada. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan perangkat daerah memiliki landasan strategi untuk mendukung pengembangan kepemudaan yang berdaya saing, peningkatan prestasi olahraga, dan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan berbasis budaya dan potensi lokal.

6.2 Kaidah Pelaksanakan

Pelaksanaan Renstra ini mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Setiap program dan kegiatan yang tercantum akan dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah, sebagai instrumen operasional pelaksnaan Renstra.

6.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan secara berkala untuk memastikan ketercapaian sasaran strategis. Mekanisme pengendalian meliputi pemantauan pelaksanaan program, pengukuran indikator kinerja, serta pelaporan

melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi dilakukan setiap tahun dan pada akhir periode perencanaan, dengan mengacu pada capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan perencanaan ke depan, sehingga kesinambungan dan konsistensi pembangunan dapat terjaga.

Dengan berpedoman pada dokumen Renstra ini, diharapkan seluruh jajaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, serta menjalin sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Tanjung, 20 September 2025

Kepala Dinas
Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Tabalong,

H.ZULFAN NOOR,S.Sos,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700809 199003 1 003